

PROGRAM KERJA

DIREKTUR HUKUM DAN ADVOKASI AP2I

2018 - 2021

Disampaikan pada
Acara Rakornas AP2I
11-12 Januari 2019

Dir Advokasi dan Hukum AP2I
Email: fikri@batan.go.id



DASAR PERTIMBANGAN



SURAT KEPUTUSAN ,KETUA UMUM PENGURUS NASIONAL,ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA (AP2I) NOMOR:007/SK/KETUM/AP2I/11/2018 TENTANG SUSUNAN PENGURUS NASIONAL ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA (PN-AP2I) PERIODE 2018-2021

Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran dan program kerja Pengurus Nasional Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (PN-AP2I) Periode 2018-2021.



Arahan pokok Menteri PPN/Kepala Bappenas pada pengukuhan PN-AP2I 2018-2021, 11 Januari 2019



SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM PENGURUS NASIONAL ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA (AP2I) NOMOR: 003/SK/KETUM/AP2I/11/2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA (PN-AP2I) PERIODE 2018-2021



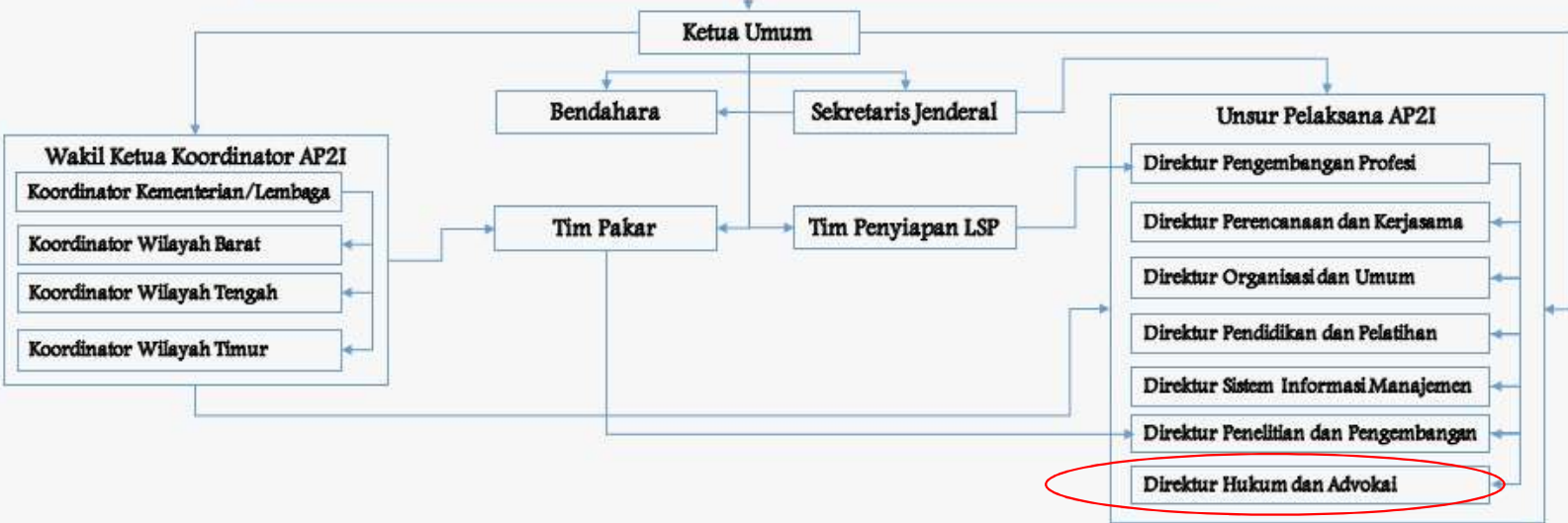
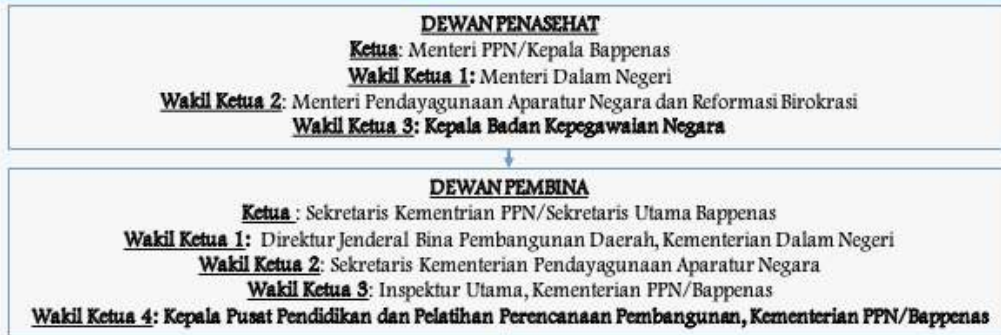
AD/ART AP2I



Isue strategis

DIREKTORAT HUKUM DAN ADVOKASI

Struktur Organisasi PN AP2I 2018-2021



TUGAS

Menyusun, mengembangkan design dan mekanisme advokasi

Melaksanakan fasilitasi dan advokasi terkait karir anggota AP2I

Memberikan pertimbangan hukum terkait organisasi dan permasalahan karir anggota AP2I menyiapkan legal drafting

FUNGSI

Penyusunan dan pengembangan rancangan dan mekanisme advokasi;

Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi terkait karir anggota organisasi;

Penyelesaian masalah hukum terkait organisasi dan permasalahan karir anggota organisasi;

Penyiapan legal drafting dan kontrak kerja organisasi;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan lingkup kedirektoratan;

Penguatan sinergi dengan direktorat lain dalam mendayagunakan produk-produk/jasa layanan AP2I, dan dalam pengembangan sumber-sumber pendanaan organisasi.

INTI DARI TUGAS DIR HUKUM DAN ADVOKASI



Fasilitasi dan advokasi terkait pengembangan karir anggota AP2I

Memberikan pertimbangan hukum terkait organisasi dan permasalahan karir anggota AP2I

Strateginya :

- Berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan kapasitas JFP yang dilakukan Pusbindiklatren – Bappenas, termasuk dalam penyusun regulasi peraturan, untuk menjaga sinergitas dengan Pusbindiklatren terkait pengembangan kapasitas JFP
- Partisipasi dalam kegiatan korwil dan komsat (untuk sosialisasi Peraturan ASN dan JFP)

Kegiatan :

Sosialisasi

- Menyusun materi sosialisasi dan
- memberikan sosialisasi peraturan dan kebijakan JFP

Advokasi dan Hukum

Memberikan fasilitasi advokasi dan pertimbangan hukum terkait permasalahan organisasi dan karir anggota AP2I saat diperlukan.

Identifikasi dan pemetaan permasalahan terkait lingkup advokasi dan hukum, timbulnya permasalahan :

- Kurang sinergitas JFP dan Strukturalnya >< Sinergi
- Lemahnya posisi tawar JFP dengan Strukturalnya >< Keseimbangan - sinergi
- Kurangnya harmonisasi JFP dengan Struktural >< Harmonisasi
- Kurang dipahaminya peraturan JFP baik oleh JFP dan struktural >< ketidak sepahaman

Usulan Pembenahan :

- Mendorong Bappenas sebagai pembina JFP menyusun peraturan terkait mekanisme Hubungan JFP dengan Tim Penilai serta Struktur, bersifat nasional, dengan Menyusun Mekanisme Advokasi (SOP)
- Perlu adanya Sosialisasi peraturan ASN dan JFP ke para JFP dan Pejabat Struktural
- Pendampingan advokasi dan Hukum saat diperlukan

AGENDA DAN PROGRAM KERJA

		2018	2019				2020				2021		
No.	Agenda Kerja	T-1	T-2	T-3	T-4	T-5	T-6	T-7	T-8	T-9	T-10	T-11	T-12
2.	Menyusun Mekanisme Advokasi (SOP)		X	X									
3.	Menyusun Bahan Sosialisasi				X	X							
2.	Sosialisasi Peraturan JFP			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Fasilitasi dan advokasi terkait pengembangan karir anggota AP2I			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	Memberikan pertimbangan hukum terkait organisasai dan permasalahan karir anggota AP2I		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



TERIMA KASIH



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL



Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan Jakarta, 12710



(021) 5255281 | Fax. (021) 525 1110



bp@batan.go.id